

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah ekonomi yang masih dihadapi oleh Indonesia. Distribusi pendapatan merupakan cerminan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan. Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan mengharuskan adanya tingkat GNI yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan GNI, tetapi juga siapa yang akan menumbuhkannya. Jika peningkatan hanya dilakukan oleh segelintir atau sekelompok orang kaya, maka hasil dari peningkatan tersebut kemungkinan besar hanya menguntungkan mereka, kemajuan dalam menanggulangi masalah kemiskinan bergerk lambat, dan kesenjangan akan memburuk. Namun, jika banyak penduduk yang ikut berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, maka manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak secara merata (Todaro & Smith, 2011). Semakin tinggi tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan, semakin lebar kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Di Indonesia angka ketimpangan dalam sepuluh tahun terakhir cenderung naik bahkan melewati angka 0,4. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 – 2008, angka ketimpangan di Indonesia berfluktuasi pada angka 0,33 – 0,36. Angka ketimpangan perlahan mulai naik pada tahun 2009 – 2015 dari 0,36 – 0,41.

Tahun 2016 dan 2017 angka ketimpangan Indonesia mulai menurun menjadi sebesar 0,39.

Setiap provinsi di Indonesia tidak terlepas dari masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Menurut data BPS tahun 2017, terdapat 6 provinsi di Indonesia dengan angka ketimpangan tertinggi yang tercermin dalam indeks gini ratio

Tabel 1. 1
6 Provinsi di Indonesia dengan Angka Ketimpangan Tertinggi, Jumlah Penduduk, dan PDRB.

Provinsi	Indeks Gini Ratio	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Miliar Rupiah)
DIY	0.44	3.457.491	92.300
Sulawesi Selatan	0.42	8.034.776	288.908
Jawa Timur	0.41	476.757	1.482.147
DKI Jakarta	0.40	9.607.787	1.635.855
Gorontalo	0,40	1.040.164	25.092
Sulawesi Tenggara	0,40	2.232.586	83.038

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Posisi pertama ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Indeks Gini Ratio Provinsi DIY sebesar 0,44. Urutan kedua Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai gini ratio 0,42. Selanjutnya Provinsi Jawa Timur yang memiliki Indeks Gini Ratio 0,41. Indeks Gini Ratio terbesar keempat dan kelima ditempati Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara dengan indeks gini ratio sebesar 0,40 dan 0,40. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa DIY merupakan provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia. Provinsi DIY terbagi

menjadi 5 wilayah yakni 1 kota yaitu Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Masing – masing dari wilayah tersebut memiliki indeks gini ratio yang berbeda – beda.

Tabel 1. 2
Indeks Gini Ratio di Wilayah DIY

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Yogyakarta	0,37	0,35	0,36	0,44	0,42	0,44	0,43	0,45
Sleman	0,37	0,42	0,47	0,39	0,41	0,45	0,40	0,41
Bantul	0,32	0,38	0,41	0,33	0,32	0,38	0,40	0,41
Kulon Progo	0,27	0,39	0,42	0,31	0,38	0,37	0,37	0,39
Gunungkidul	0,27	0,34	0,37	0,27	0,30	0,32	0,33	0,34

Sumber : Susenas BPS, 2018

Menurut data Susenas BPS tahun 2012 – 2017, Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah di Provinsi DIY yang memiliki angka Gini Ratio terendah. Sedangkan selama 7 tahun terakhir kecuali tahun 2015, wilayah kota Yogyakarta memiliki angka Gini Ratio tertinggi di Provinsi DIY. Indeks Gini Ratio yang sudah melebihi angka 0,30 menunjukkan bahwa wilayah Kota Yogyakarta termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria tingkat ketimpangan sedang atau moderat. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa, hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta belum bisa dinikmati oleh semua lapisan penduduk secara merata. Meningkatnya

angka kesenjangan yang hampir terjadi setiap tahun harus segera diatasi, karena jika masalah ini dibiarkan berlarut larut bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu kesenjangan yang semakin meningkat akan memiliki dampak buruk bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan kemiskinan yang semakin parah. Kemiskinan dapat tercermin dari tingkat pendapatan yang diterima. Pendapatan yang rendah mencerminkan bahwa seseorang berada dalam kondisi miskin. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsono & Donkwa (2016). Dalam penelitiannya terdapat 2 dari faktor yang berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat di Desa Senujuh Provinsi Kalimantan Barat, yaitu jumlah jam kerja dan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan mereka membayar kembali. Semakin tinggi jumlah jumlah jam kerja, semakin tinggi pendapatan yang diterima. Begitu juga dengan jumlah pinjaman. Semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin tinggi jumlah pendapatan yang diterima. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh dari pinjaman lembaga nonkeuangan resmi digunakan untuk mengembangkan usaha mereka dana tersebut bisa lebih produktif dan berkembang yang akhirnya akan meningkatkan jumlah pendapatan mereka.

Islam juga memiliki instrumen untuk menambah pendapatan masyarakat miskin, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan memperkecil angka ketimpangan pendapatan, instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat islam dengan memberikan sebagian

harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang – orang yang berhak menerimanya. Dalam zakat terjadi perpindahan harta dari orang yang memiliki harta berkecukupan atau lebih, kepada orang yang membutuhkan, sehingga harta tidak menumpuk pada satu atau sekelompok orang saja. Selain itu, zakat juga bisa menjadi sarana bagi individu untuk menyucikan harta serta sebagai sarana bagi sesama manusia untuk mempererat hubungan silaturahmi dan saling tolong menolong. Dengan demikian zakat dapat meminimalisir tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

Islam memandang dalam meminimalisir masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan negara harus melakukan intervensi. Al Quran mengajukan prinsip Al Ma'un atau tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam lembaga negara (Fathurrahman, 2012). Salah satu wujud intervensi pemerintah dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan adalah didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten. Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Yogyakarta merupakan salah satu contoh badan amil zakat yang didirikan pemerintah di tingkat kota. Baznas Kota Yogyakarta dapat menerima pembayaran zakat, infaq, dan sedekah untuk disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan 8 asnaf. Menurut data Baznas Kota Yogyakarta, penerimaan dan pendistribusian dana zakat dan infaq setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Tabel 1. 3
Penerimaan Dana Zakat dan Infaq Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2017

Tahun	Jumlah Penerimaan Dana Zakat dan Infaq	Jumlah Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq
2013	Rp 3.400.928.987	Rp 4.671.036.000
2014	Rp 3.743.957.222	Rp 3.707.725.000
2015	Rp 3.889.590.897	Rp 3.863.872.073
2016	Rp 4.384.813.182	Rp 4.301.079.503
2017	Rp 5.756.104.023	Rp 5.644.672.600

Sumber : Baznas Kota Yogyakarta, 2017

Peningkatan dana zakat dan infaq yang diterima dan didistribusikan setiap tahunnya menjadikan dana tersebut sebagai sumber dana yang potensial dalam mengurangi angka ketimpangan. Dana zakat dan infaq yang diperoleh Baznas Kota Yogyakarta akan dikelola dan didistribusikan kepada orang membutuhkan sesuai dengan 8 golongan penerima zakat, baik itu bersifat bantuan langsung (zakat konsumtif) maupun bantuan untuk modal usaha (zakat produktif). Zakat konsumtif sifatnya lebih kondisional sehingga manfaat yang dirasakan hanya dalam jangka pendek. Sedangkan zakat produktif seperti bantuan modal usaha manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang. Hal ini dikarenakan pemberian zakat berupa modal usaha tersebut dapat lebih produktif dan berkembang, sehingga mampu menghasilkan keuntungan sekaligus menambah pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Beik & Pratama (2015) bahwa pemberian zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, sehingga pendayagunaan zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Semakin besar jumlah pendapatan yang diterima, semakin terpenuhi kebutuhannya. Dana zakat memang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Walau begitu, pengaruh penerimaan dan pendistribusian dana zakat juga ditentukan oleh badan atau lembaga amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dari muzaki serta penerima bantuan zakat dalam mengelola bantuan zakat. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat yang diterima akan mampu meningkatkan produktivitas mustahik, yang selanjutnya mampu meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik, sehingga kesejahteraan akan tercapai. Bukan hanya itu saja, peningkatan pendapatan mustahik akan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar dana zakat dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Dalam hubungan inilah penelitian mengenai Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Tingkat Kesenjangan Pendapatan dan Kesejahteraan Mustahik : Studi Kasus Mustahik Baznas Kota Yogyakarta dilakukan.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini mengambil studi kasus Baznas Kota Yogyakarta dengan melihat pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap kesenjangan pendapatan, serta mengukur kesejahteraan mustahik Baznas Kota Yogyakarta.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaruh pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta dalam mengurangi kesenjangan pendapatan?
2. Bagaimana pengaruh pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui angka kesenjangan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari Baznas Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari Baznas Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, rekomendasi, dan referensi bagi penulis berikutnya yang berkaitan dengan zakat.

2. Untuk Pemerintah.

Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja Baznas Kota Yogyakarta agar program – program dapat berjalan lebih baik.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.